



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADANG SOMANTRI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
3. NHK : **185816**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.322.910.423**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 133.776.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/73 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 553.528.000
3. Bangunan Seluas 28 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 383.254.423
4. Tanah Seluas 1659 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 212.352.000
5. Tanah Seluas 128 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 128 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 485.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, WARISAN Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO E SATYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VENTURER MINI BUS Tahun 2018, WARISAN Rp. 313.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	67.625.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.018.426.589
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.893.962.512
III. HUTANG	Rp.	64.481.346
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.829.481.166

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.